

PENEGAKAN HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) TERHADAP PERUSAHAAN ASING SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI DI INDOENESIA

Sekar Tanjung Ajita

Abstrak

Penelitian ini membahas penegakan hukum pemungutan pajak penghasilan (PPh) terhadap perusahaan asing sebagai wajib pajak luar negeri di Indonesia dan penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) sebagai *lex specialis* dalam pemungutan pajak penghasilan bagi perusahaan asing sebagai wajib pajak luar negeri dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Seperti yang diketahui, pemerintah Indonesia saat ini sedang berusaha meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, termasuk pajak penghasilan terhadap perusahaan asing yang memperoleh penghasilan di Indonesia., untuk itu Direktur Jendral Pajak (fiskus) selaku aparaturnegak hukum pajak perlu melakukan berbagai upaya agar pemungutan pajak penghasilan terhadap perusahaan asing sebagai wajib pajak luar negeri berjalan baik termasuk. Selain itu, dalam melakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) terhadap perusahaan asing sebagai wajib pajak luar negeri terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang berkedudukan sebagai *lex specialis* dari Undang – Undang Pajak Penghasilan akibatnya ketentuan pemungutan pajak domestik dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan dikesampingkan, untuk itu proses penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) perlu diketahui oleh masyarakat dimulai dari proses ratifikasi kemudian tata cara penerapan.

Kata Kunci : penegakan hukum, pemungutan pajak penghasilan, perusahaan asing.

**LAW ENFORCEMENT OF INCOME TAX COLLECTION ON FOREIGN
COMPANY AS A NON-RESIDENT TAXPAYER IN INDONESIA**

Sekar Tanjung Ajita

Abstract

This research dicusses the law enforcement of income tax collection on foreign company as a non-resident taxpayer in Indonesia and appliacion procedure of The Avoidance of Double Taxation Agreement as a lex specialis in income tax collection on foreign company as a non-resident taxpayer using normative-empiric judicial method reserach. As already known, Indonesia's government is trying to increase country income, especially from income tax, including income tax for foreign company which gain an income from Indonesia. Therefore, Indonesia Director General of Taxes (fiscus) as a law enforcer apparatus needs to do several effort so the income tax collection will operate well. There is an agreement of the avoidance of double taxation which work as a lex specialis from Law Republic of Indonesia of Income Tax, as a result the general income tax collection provision in Law Republic of Indonesia of Income Tax should be ruled out, therefore application procedure of The Avoidance of Double Taxation Agreement must be knwon, starting from the the ratification process then the procedure for application.

Keywords : law enforcement, income tax collection, foreign company.